

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dalam proses pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya- upaya telah diusahakan oleh pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. (Dwiyanto, Agus. 2011)

Dalam hal ini sangat diperlukan penguatan dalam pembangunan sektor ekonomi untuk memajukan suatu perekonomian dalam negara. Pembangunan ekonomi tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu dengan menumbuhkan dan berusaha untuk mengembangkan dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak positif pada bidang perekonomian disuatu negara. Hal tersebut dapat

dilihat saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan krisis tahun 2008 sampai 2009, 96% UMKM tetap bisa bertahan dari guncangan krisis (Bank Indonesia dan LPPI, 2015).

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM dapat menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI masing-masing dan PP RI Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha, Kecil, Dan Menengah. Koperasi diatur dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan dasar hukum Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun Sebagai Usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, Asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha,

pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan dan membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan menekankan tingkat angka kemiskinan. UMKM merupakan salah satu wadah untuk penciptaan lapangan kerja yang produktif untuk masyarakat. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana (Badruddin, Rudi. 2012). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pendekatan strategis sangat dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak demi terwujudnya kemajuan UMKM. Dalam mengembangkan UMKM perlu kerjasama antara pemerintah daerah itu sendiri dengan pelaku UMKM sehingga untuk kedepannya bisa berjalan dengan lebih maksimal. Disamping itu dalam pengembangan UMKM juga tergantung bagaimana pemerintah bisa berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* demi terwujudnya kemajuan UMKM di masa mendatang.

Selain itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia (<http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm>, diakses 4 Oktober 2017 pukul 20:21 WIB). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012 – 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2013 total Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Rp. 9.014,9 triliun. Dimana UMKM menyumbang Rp. 5.440,0 triliun atau 60,34% dari total PDB Indonesia, jadi UMKM memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan ekonomi. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57,89 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja mencapai 114,14 juta orang atau 96,99% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dari data yang telah disebutkan diatas dapat dilihat bahwa UMKM memiliki peranan strategis dalam menyumbang pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pendekatan strategis sangat dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak demi terwujudnya kemajuan UMKM. Dalam mengembangkan UMKM perlu kerjasama antar para *stakeholder* terkait, model *Penta Helix* dengan rumus ABCGM yang merupakan singkatan dari *Academy, Bussines, Commuity, Goverment, dan Media* cocok digunakan sebagai model kerjasama (Badruddin, Rudi. 2012).

Program pengembangan UMKM sangat berkaitan dengan berbagai sektor pada proses bisnis yang dijalankan, sehingga membutuhkan peran dari berbagai *stakeholder*.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, moto dari Kabupaten Bantul ini sendiri adalah Projotamansari yang mempunyai singkatan dari Produktif Profesional, Ijo royo- royo, tertib, aman dan

asri. Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terkenal akan sentra kerajinannya, selain itu Kabupaten Bantul memiliki perkembangan yang baik dalam hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ada banyak sekali kerajinan yang yang dihasilkan oleh masyarakatnya, salah satunya di kecamatan yaitu kecamatan Sanden, selain memiliki keindahan pantai dan alam pedesaan dengan hamparan persawahannya yang luas dan hijau, Kecamatan Sanden juga memiliki tempat sentra kerajinan yang unik yaitu sentra kerajinan Bathok kelapa yang terletak didusun Piring Desa Murtiganding dan kerajinan Enceng gondok yang berlokasi di dusun Jambu, desa Gandingsari yang keduanya terletak di kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.

**Tabel 1.1 Jumlah UKM Kabupaten Bantul tahun 2008- 2015**

No	Tahun	Jumlah Seluruh UKM	Jumlah UKM non BPR/LKM	Jumlah
1	2008	44.561	12	44.549
2	2009	44.681	14	44.667
3	2010	44.768	14	44.754
4	2011	44.778	15	44.763
5	2012	44.778	15	44.763
6	2013	44.805	15	44.768
7	2014	45.330	17	45.347
8	2015	45.830	17	45.847

*Sumber:disperindagkop Kab. Bantul 2016*

Data diatas merupakan jumlah UKM yang tercatat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Dengan adanya UMKM tersebut sangat berdampak pada perekonomian masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bantul. Dengan adanya pengembangan dalam bidang kerajinan tentu akan dapat merubah perekonomian yang ada di kecamatan Sanden, Ide awalnya teretus ketika melihat banyaknya

tempurung atau batok kelapa yang dihasilkan dari industri makanan khas Bantul, seperti geplak, sagon, dan minyak goreng yang limbahnya (batoknya) biasa untuk arang. Ada dua jenis produk yang dihasilkan yaitu produk handycraft dan furniture.

**Tabel 1.2 Jumlah UKM, Penyerapan Tenaga Kerja dan Omset UKM Tahun 2008-2015 di Kabupaten Bantul**

No	Tahun	Jumlah UKM	Peny. Tenaga Kerja	Omset Per Tahun (000.000)
1	2008	44.561	187.156	5.347.230
2	2009	44.681	187.660	5.585.125
3	2010	44.768	192.502	5.685.536
4	2011	44.778	192.545	5.821.140
5	2012	44.778	197.023	5.865.918
6	2013	44.805	197.142	5.914.260
7	2014	45.330	199.452	5.439.600
8	2015	45.830	200.142	5.469.960

*Sumber: Disperindagkop Kab. Bantul 2016*

Dengan adanya kemajuan dalam bidang UMKM itu sendiri dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang akan berefek pada pendapatan perekonomian masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan pemerintah Kabupaten Bantul sudah berhasil dalam membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bantul dalam memperbaiki perekonomian. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian yang bekerja sama dengan PT Telkom dalam hal membangun Kampung Digital. Dengan diadakannya UKM kampung Digital diharapkan mampu membantu para pelaku UMKM dalam hal pemasarannya agar lebih bisa efektif. Salah satu program dari kampung digital itu sendiri adalah *Electronic commerce (e-commerce)* yaitu merupakan layanan pemasaran dan penjualan yang dapat dilakukan secara *online* di internet

(Dwiyanto, Agus. 2011) *E-commerce* merupakan salah satu cara untuk menembus pasar global. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Bantul telah berhasil membangun kerja sama yang baik dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakatnya itu sendiri dengan cara bekerjasama dengan PT. Telkom dalam program Kampung Digital.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM selanjutnya yang didukung dengan adanya kampung Digital akan sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian tersebut, dikarenakan pelaku UMKM atau pengrajin dapat memasarkan hasil kerajinanya dengan dengan lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia namun bisa dipasarkan diluar negeri. Program Kampung UKM Digital ini merupakan program pemberdayaan masyarakat UMKM melalui upaya mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kampung UMKM Digital di Bantul yang difasilitasi jaringan kebel optik dari PT Telkom telah dimulai sejak Agustus 2016 dengan pelaksanaan berpusat pada sentra-sentra kerajinan yang ada di kabupaten Bantul.

Setelah melakukan Wawancara dengan Ibu Desi (14 november 2018 pukul 10.30) yang merupakan salah satu pendamping UKM Kecamatan Sanden yang ditugaskan dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kabupaten Bantul menyatakan bahwa pelaku umkm khususnya sentra enceng gondok dan batok kelapa di Kecamatan Sanden sudah dapat dikatakan mampu memproduksi hasil kerajinan dengan angka yang cukup tinggi sekitar Kapapasitas produksi per bulan rata-rata mencapai 1000 pieces barang kerajinan yang dihasilkan, namun yang menjadi permasalahan dalam proses pengembangan, sudah ada upaya pengembangan UMKM terkait dengan kerajinan Enceng gondok dan Batok kelapa, dalam usaha ini dapat dikatakan sudah optimal dengan kapasitas pengrajin dengan angka 15- 30 orang dalam satu sentra industri, hal ini dapat dika takan mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ada disekitar kecamatan Sanden.

Selanjutnya menurut data yang didapat dari bapak Affun (27 November 2018 pukul 10.20) perwakilan dari Bidang Sarana & Infrastruktur Industri dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kabupaten Bantul menyatakan bahwa sudah terjadi *Collaborative Governance*, dalam upaya pengembangan sentra industri baik yang dengan Kecamatan Sanden ataupun Kecamatan- kecamatan yang ada dikabupaten bantul dari tahun 2001. Proses *Collaborative Governance*, pemerintah daerah sudah melakukan pendampingan, pemberdayaan dan pendataan UKM terkait dengan enceng gondok dan batok kelapa di Kecamatan sanden mulai dari 2002 hingga 2017, Dinas Koperasi terus memberikan pendampingan, dengan harapan mampu para pelaku umkm dapat mengembangkan tingkat kreatifitas produk yang dihasilkan, dalam kolaborasi



yang dijalankan dengan bekerja sama dengan PT. Telkom ternyata dari para pengrajin itu sendiri mengalami kendala, dimana selain ekspor dalam proses penjualan lainnya melalui program kampung digital juga mengalami kendala, para pelaku UMKM tidak terlalu tertarik dengan program yang diberikan, karena dianggap lebih susah, untuk bergabung dengan *market place* yang digunakan untuk memasarkan hasil kerajinan yaitu di Belanja.com terbilang proses yang harus dilalui cukup rumit bagi para pengrajin, maka dari itu para pelaku UMKM enceng gondok dan batok kelapa lebih memilih memasarkan hasil kerajinanya secara manual. Para pengrajin lebih memilih untuk menjual barang hasil kerajinan tersebut kepada salah satu pengepul atau CV yang sudah berbadan hukum untuk mengekspor barang hasil kerajinan yang mereka hasilkan.

Kabupaten Bantul merupakan termasuk kabupaten yang berupaya untuk meningkatkan sektor industri Kreatif dikalangan industri kecil hingga menengah, dalam pengembangan sektor industri kreatif ini, dengan era sekarang ini Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya meningkatkan sektor Industri yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini salah satu teori yang berkembang belakangan ini adalah *Collaborative Governance*, yaitu paradigma yang melihat bagaimana Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan *Stakeholder* yang terkait dalam proses pembangunan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program yang dijalankan. dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai upaya untuk mengarah ke dalam salah satu industri yang ada dikecamatan Sanden yaitu industri Enceng Gondok dan Batok Kelapa.

Dalam proses ini sudah ada *Collaborative Governance* antara Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yaitu Dinas Koperasi UMK dan Perindustrian yang bekerja sama dengan PT. Telkom dalam upaya Pengembangan Sentra yaitu industri Enceng Gondok dan Batok Kelapa yang ada di Kecamatan Sanden. Hanya saja permasalahannya belum optimal. dari wawancara awal dengan pendamping UMKM yang ada di Kecamatan Sanden menunjukkan bahwa Pemerintah daerah sudah berupaya melakukan Collaborative Governance dengan *Stakeholder* , yaitu dinas Koperasi UKM dan perindustrian Kabupaten Bantul bekerja sama dengan PT. Telkom dalam upaya pengembangan sentra industri enceng gondok dan batok kelapa yang ada di Kecmatan Sanden melalui programnya yaitu Kampung Digital.

Namun dalam implementasi kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta yaitu PT. Telkom dapat dikatakan belum optimal, adanya hambatan yang dialami dari baik dari segi Budaya ataupun permasalahan- permasalahan lainnya, hal ini juga disebabkan karena kurangnya koordinasi antar *Stakeholder* yang terkait dalam proses kolaborasi ini. Selain itu juga belum optimalnya dalam penjualan produk yang dihasilkan dari tahun ketahun justru mengalami penurunan dari sekitar angka 1000 pieces menjadi 800 pieces perbulanya, hal ini disebabkan oleh kurangnya bahan baku yang digunakan oleh para pengrajin, selanjutnya perlu peningkatan kreatifitas dari kreasi yang dihasilkan, belum optimalnya pemasaran yang dilakukan juga disebabkan dari kurangnya antusias para pelaku umkm yang ada di Kecamatan Sanden untuk menggunakan program yang telah disarankan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan PT. Telkom yaitu program Kampung Digital. (<https://bantulkab.go.id/berita/620.html>). Dalam hal ini peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan collaborative governance yang ada di kecamatan Sanden dengan judul penelitian **Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Sentra Enceng Gondok Dan Batok Kelapa Di Kecamatan Sanden Tahun 2017.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Sentra Enceng Gondok Dan Batok Kelapa Di Kecamatan Sanden Tahun 2017?
2. Faktor faktor apa saja yang menghambat proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Sentra Enceng Gondok Dan Batok Kelapa Di Kecamatan Sanden Tahun 2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kabupaten Bantul dan pelaku Umkm dalam pengembangan industri sentra Enceng gondok dan batok kelapa di kecamatan Sanden tahun 2017.
2. Selain itu untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan industri sentra Enceng Gondok dan Batok kelapa yang ada dikecamatan Sanden.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pemerintahan.
- b. Menambah bahan kajian dalam studi ilmu pemerintahan terkait dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan pelaku UMKM.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kolaborasi pemerintah daerah dengan pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM.
- b. Dapat menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Bantul terkait program pengembangan UMKM.
- c. Dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan program atau kebijakan yang telah berjalan dalam bidang UMKM.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN DAN KESIMPULAN
1.	Ida Rizkiany Nur (2017)	Peran Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Industri Konveksi di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM telah melakukan beberapa peran untuk pemberdayaan UMKM Desa Padurenan yakni peminjaman modal sementara melalui KSU Padurenan Jaya, kerjasama dengan PT. Telkom terkait pemasaran <i>online</i> , dan adanya pelatihan dan pembinaan bagi pengusaha industri kecil. Namun masih terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain karena keterbatasan sumber daya manusia yang masih relatif sulit mengadopsi teknologi baru, terbatasnya akses pemasaran dan permodalan.
2	Heru Susanto (2016)	Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kerajinan dan Fesyen Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Dari hasil penelitian yang membahas tentang Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kerajinan dan Fesyen Di Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan optimal karena kurangnya inovasi-inovasi baru yang diterapkan sehingga dapat menghambat perkembangan usaha yang dijalankan.

3.	Muhammad Malik Hakim dan Mukhamad Nurkamid (2017)	Model Adopsi UKM Di Kudus Terhadap <i>E-Commerce</i> .	Penelitian ini menjelaskan hubungan antar faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan <i>e-commerce</i> oleh UKM Konfeksi di Padurenan – Kabupaten Kudus. Pemanfaatan <i>e-commerce</i> di UKM Padurenan Kudus terlihat belum efektif, hal ini dikarenakan pelaku UKM belum memiliki niat dan keyakinan yang tinggi terhadap manfaat penggunaan <i>e-commerce</i> , tidak adanya dukungan sosial dari komunitas UKM untuk menggunakan <i>e-commerce</i> , dan kurangnya dukungan fasilitas baik sarana maupun prasarana dan tenaga ahli dari pihak pemina UKM terkait.
4	Sutapa Mulyana (2014)	Peningkatan Kapabilitas Inovasi, Keunggulan Bersaing dan Kinerja melalui Pendekatan <i>Quadruple Helix</i> : Studi Pada Industri Kreatif Sektor Fashion.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kreativitas dan kapabilitas inovasi bagi pelaku industri kreatif dapat dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara <i>intellectuals, government, business dan civil soceity (Quadruple helix)</i> dan keempat aktor menjalankan tugas yang optimal sesuai dengan perannya. Pada penelitian ini <i>Quadruple Helix (intellectuals, government, business, civil soceity)</i> berpengaruh signifikan terhadap kreativitas. <i>Intellectuals</i> dan <i>business</i> berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas inovasi, tetapi <i>government</i> dan <i>civil soceity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas inovasi. Kreativitas berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas inovasi. Kreativitas dan kapabilitas inovasi berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing dan kinerja.

5.	Rachmat Slamet (2016)	Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas 14	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital terbukti dapat meningkatkan kinerja UKM, terutama pada peningkatan akses ke pelanggan baru di dalam negeri dan peningkatan penjualan. Strategi pengembangan secara digital dibutuhkan oleh para UKM dalam penyediaan infrastruktur ICT, proses produksi, dan perluasan pasar baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar para UKM memiliki daya saing dan meningkatkan kinerjanya.
6	Heru Susanto (2016)	Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kerajinan dan Fesyen Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kreatif subsektor kerajinan dan fesyen di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu memberi peran yang cukup besar baik dalam penyerapan tenaga kerja ataupun pendapatan daerah. Strategi pengembangan UMKM pelaku ekonomi kreatif subsektor kerajinan dilakukan dengan cara meningkatkan kreatifitas SDM untuk menghasikan produk sesuai dengan permintaan pasar, memberikan informasi pasar dan pemasaran yang lengkap tentang pasar nasional maupun internasional, memberikan bekal jiwa kewirausahaan, dan mencari jalan alternatif sumber-sumber pembiayaan. Untuk strategi pengembangan fesyen dilakukan dengan cara meningkatkan kreativitas SDM untuk menghasilkan produk sesuai permintaan pasar, mencari bahan baku yang berkualitas dan harganya terjangkau serta mampu menciptakan kreativitas yang baru, dan meningkatkan kreativitas dan efisiensi baik produksi maupun pemasaran.

7	Dani Danuar Tri Utama dan Darwanto (2013)	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang belum dapat dijadikan sebagai penopang utama perekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota ini. UMKM kreatif di Kota Semarang memiliki kemampuan yang terbatas serta mengalami permasalahan dalam pengembangan usahanya. Hal ini menyebabkan UMKM kreatif belum mampu memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi UMKM kreatif di Kota Semarang antara lain permodalan, bahan baku dan faktor produksi, tenaga kerja, biaya transaksi, pemasaran, dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). UMKM berbasis ekonomi kreatif memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai kemajuan di dunia usaha. Tidak hanya pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga masyarakat perlu turut serta mengembangkannya.
---	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari pemaparan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengembangan UMKM, dalam penelitian diatas lebih membahas dari segi Peran Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Industri yang ada dimasing-masing daerahnya, selain itu hanya membahas strategi yang diterapkan guna mengembangkan UMKM. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu terdapat Kolaborasi antara pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi UMK Dan Perindustrian Kabupaten Bantul Dan Pelaku UMKM



Dalam Pengembangan Industri Sentra Enceng Gondok Dan Batok Kelapa Di Kecamatan Sanden. Perlu adanya kolaborasi yang terjalin karena pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup luas guna membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM yang ada di kecamatan Sanden, dengan adanya kolaborasi yang baik maka akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan dari suatu usaha tersebut dalam peningkatan baik dari perekonomian maupun peluang untuk tenaga kerja itu sendiri. Selain itu terdapat pihak ketiga PT. Telkom dengan programnya yaitu Kampung Digital yang ditujukan dan diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam proses pemasaran.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Collaborative Governance**

Menurut Ansell and Gash (2007), *collaborative governance* merupakan salah satu tipe governance dimana aktor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus menggunakan proses tertentu untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik. Selain itu Ansell and Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance. Bentuk dari governance yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparaturnya pemerintah untuk membuat keputusan bersama.

Untuk memahami konsep *Collaborative governanceter* lebih dahulu perlu memahami tentang kolaborasi secara lebih rinci hal ini dikarenakan untuk dapat lebih memahami dan mengenali alasan mengapa kolaborasi itu penting untuk dilakukan dalam pemerintahan modern dan bagaimana upaya upaya yang dilakukan untuk mencapainya. (Ansell dan Alison, 2007:543). Kolaborasi dapat

dikatakan sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara bekerjasama, berinteraksi, maupun berkompromi dengan beberapa pihak baik individu, lembaga, serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Sulistyoningsih, 2013).

### 3. Bentuk Collaborative Governance

Berikut ini merupakan beberapa item yang dijadikan sebagai landasan *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:550) yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Strating Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Bentuk ketidakselarasan tersebut antara lain seperti distrust, sikap tidak saling menghormati, antagonisme antaraktor atau pertentangan. Menurut Ansel dan Gash (2007) dalam (Harmawan, 2016) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal imbalances between the resources or power of different stakeholder, the incentives between that stakeholders have to collaborate, and the past history of conflict or cooperation among stakeholders (ketidakseimbangan antara sumber-sumber atau kekuatan antar stakeholder yang berbeda, dorongan-dorongan bahwa aktor-aktor harus berkolaborasi dan latar belakang sejarah konflik bekerjasama stakeholder).

#### 2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

3. Aspek kepemimpinan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kolaborasi antar pemerintah dengan non-pemerintah. Kepemimpinan merupakan bagian krusial dan memiliki peran secara jelas dalam menetapkan peraturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan menganalisa keuntungan bersama. Ansel dan Gash (2007) dalam Harmawan (20016)

mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

1. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi
2. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis
3. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Kolaborasi yang sukses itu menggunakan mekanisme Multiple Leadership. Lasker dan Weis dalam Harmawan (2016) menemukan bahwa kepemimpinan yang berkolaboratif harus memiliki ketrampilan-ketrampilan berupa (1) mempromosikan 30 secara luas dan aktif berpartisipasi, (2) memastikan pengaruh dan kontrol secara aluas (3) memfasilitasi produktivitas dinamikadinamika kelompok atau aktor, (4) mampu memperluas cakupan proses.

Ketika tidak terdapat relasi yang bersifat simetris antara pemerintah dengan swasta maka harus dimunculkan pemimpin “organik” yang berasal dari stakeholder masyarakat. Ketersediaan pemimpin seperti itu akan sangat bergantung pada keadaan lokal.

#### 4. *Intitutional Design* (Desain Institusional)

Ansel dan Gash (2017) dalam Harmawan (2016) mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada protokolprotokol dasar dan aturan-aturan dasar utnuk berkolaborasi secara kritis yang pailng ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat

terbuka dan inklusif. Karena hanya beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Proses harus terbuka dan inklusif karena hanya kelompok yang merasa memiliki kesempatan yang sah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan komitmen dalam proses yang terjadi. Pemerintah dalam konteks ini harus bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang luas kepada stakeholder yang terlibat.

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada (1) kesempatan bagi setiap aktor berkomunikasi dengan stakeholder lain tentang hasil-hasil kebijakan, (2) klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat aktor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi aktor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus ada keterlibatan aktor lain secara inklusif. Dalam proses desain institusional tersebut harus memakai orientasi yang bersifat konsensus. Isu desain institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

#### 5. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Harmawan (2016) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan masalah), direction setting (penentu tujuan), dan implementasi. Dalam kajian-kajian literatur yang sudah dilaksanakan kita berhenti pada bahwa

proses kolaborasi terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang untuk bergantung pada pencapaian hanya mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog *Face to Face*.

a. *Trust buildig* (Membangun kepercayaan)

Adanya kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, beberapa literatur menyatakan proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. Trust building menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar stakeholder agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.

b. *Comitment to process* (Komitmen terhadap proses)

Meskipun terminologi komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberapa contoh kasus mengungkapkan bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen erat hubungannya pada motivasi yang bersifat orisinal untuk berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam

kolaborasi. Komitmen bergantung pada kepercayaan akan aktor-aktor lain mau menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Hal ini juga menjelaskan secara gamblang seberapa bersih, seberapa adil, dan transparan prosedur. Sebelum berkomitmen pada sebuah proses yang berjalan dengan arah tidak terprediksi, aktor-aktor harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa prosedur deliberasi dan negosiasi memiliki integrasi. Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Collaborative governance dapat membentuk rasa kepemilikan terhadap pengambilan keputusan dari lembaga agensi atau pemerintah kepada stakeholder yang bertindak secara kolektif.

c. *Share unserstanding* (Saling memahami)

Dibeberapa poin proses kolaborasi, aktor-aktor harus mengembangkan *share understanding* (sikap saling memahami terhadap apa yang akan dicapai bersama. *Share understanding* dalam beberapa literasi disebut sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi bersama, ideologi bersama, tujuan-tujuan yang jelas, arah yang strategis dan jelas atau keselarasan nilai-nilai inti. *Share understanding* juga dapat berarti kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah.

d. *Intermediate Outcomes* (Hasil sementara)

Banyak studi kasus memperlihatkan bahwa kolaborasi secara relatif dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari kolaborasi. Meskipun hasil sementara ini akan

menampilkan output atau keluaran nyata akan tetapi proses outcomes tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Dalam proses intermediate outcomes tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir yang dicapai.

#### **4. Indikator ukuran keberhasilan Kolaborasi**

DeSeve (dalam Sudarmo 2011:110-116) terdapat beberapa item penting yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah jaringan atau kolaborasi dalam *Governance* yang meliputi :

a. Tipe *Networked Structure* ( jenis struktur jaringan)

Dimana menjelaskan tentang keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama sama dengan menggambarkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Dalam hal ini ada banyak bentuk *Networked Structure* seperti *hub* dan *spokes*, bintang dan *cluster* ( kumpulan terangkai dan terhubung) yang dapat digunakan.

b. *Commitment to a common purpose* ( komitmen terhadap tujuan)

*Commitment to common purpose* disini dapat dikatakan mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus diadakan. Adalah karena perlunya perhatian dan komitmen dalam rangka mencapai tujuan tujuan yang positif atau tujuan yang diharapkan. Tujuannya disini biasanya terartikulasikan didalam misi umum suatu organisasi yang ada dipemerintahan.



- c. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan)

*Trust among the participants* didasarkan pada hubungan profesional atau sosial. Dimana keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi- informasi dan usaha usaha dari *Stakeholder* lainya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori bahwa mereka bisa “percaya” terhadap patrner- patner rekan kerja pada jaringan.

- d. *Governance*: dalam hal ini terdapat yang dimaksudkan adalah bagaimana aturan aturan yang mengatur kolaborasi yang akan dijalankan, selanjutnya menjelaskan regulasi regulasi yang terkait dalam upaya menjalankan program yang dilaksanakan dan selanjutnya kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dapat dijalankan.

- e. *Acees to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Yakni tersedia standar- standar ketentuan atau prosedur- prosedur yang jelas dan dapat diterima secara luas. Bagi kebanyakan *network* , jaringan jaringan tersebut harus memberi kesan kepada salah satu anggota jaringan untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan pekerjaanya.

- f. *Distributive accountability / Responsibility* (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)

Yakni berbagai pemerintahan (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama- sama dengan *stakeholder* dan lainya) dan alam bergabagai

pengambilan keputusan kepada seluruh anggota jaringan, dengan demikian berbagai tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal. Jika para anggota tidak terlibat dalam proses menentukan tujuan jaringan tersebut maka kemungkinan *network* itu akan gagal mencapai sebuah tujuan.

g. *Information sharing* (berbagai informasi)

Yakni kemudahan yang dapat diakses oleh para anggota, perlindungan kerahasiaan identitas pribadi seseorang, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak dan kemudian dari akses tersebut bisa mencakup semua sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

h. *Acces to resoures* (akses terhadap sumberdaya)

Yakni dalam ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*.

## 5. Hambatan dalam Kolaborasi

Dalam hal ini terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk dalam partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder*. Menurut Government of Canada, 2008 dalam Sudarmo, (2011:117-120) mengenai terhambatnya jalanya suatu kolaborasi dan partisipasi disebabkan oleh banyak faktor, terutama oleh faktor budaya, faktor-faktor institusi dan faktor faktor politik.

- a. Budaya : Terkait dengan faktor budaya bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya yang bergantung pada prosedur dan tidak berani mengambil keputusan dan menanggung resiko.
- b. Institusi-institusi :Terkait dengan faktor-faktor institusi dalam hal kolaborasi ini bisa gagal karena adanya kecenderungan insitusi yang terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi (terutama dengan pihak pemerintah), disitu akan cenderung menerapkan struktur hirarkis terhadap institusi- institusi lain yang terlibat dalam kerja sama kolaborasi tersebut.
- c. Politik : Dimana terkait dengan faktor politik ini kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kolaborasi bisa saja menghambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi ini kurang atau tidak inovatif. Dan faktor penghambat lainnya adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar *stakeholder* yang terlibat.

## **2.UMKM**

### **a. Pengertian UMKM**

Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi

nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Konsep dan kriteria UMKM dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah adalah:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### **b. Pengembangan UMKM**

Menurut Clapham (Pratiwi, 2016), pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya memberikan kebebasan pasar melalui kerjasama dengan sektor swasta dengan cara memperluas peluang untuk memperoleh faktor produksi dan memperbesar jumlah barang buatan perusahaan kecil dan menengah, memperbaiki sistem informasi ekonomi dengan cara melakukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam menyiarkan informasi secara berkala melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.

### **G. Definisi Konseptual**

1. *Collaborative Governance* adalah dimana aktor publik dan privat yang melakukan kerja sama yang dibangun berdasarkan sebuah rasa

kepercayaan, tanggungjawab, serta dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, dan bisa dilakukan secara berkesinambungan. menggunakan proses tertentu untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
3. Pengembangan Sentra industri merupakan suatu wilayah dimana didalamnya terdapat pengelompokan industri yang sejenis atau memiliki kaitan erat dengan proses suatu kerajinan.

## H. Definisi Operasional

Tujuan dibuatnya definisi operasional ini adalah untuk memberikan batasan-batasan bagi peneliti sehingga memudahkan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian. Definisi Operasional yang digunakan untuk melihat *collaborative governance* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### A. Indikator Keberhasilan Collaborative Governance

No	Variabel	Indikator
1	Tipe <i>Networked Structure</i> ( jenis struktur jaringan)	a. Struktur jaringan b. Keterkaitan antar <i>Stakeholder</i>

2	<i>Commitment to a common purpose</i> (komitmen terhadap tujuan)	a. Alasan sebuah jaringan diadakan b. Komitmen dan perhatian
3	<i>Trust among the participants</i> (adanya saling percaya diantara para pelaku/ peserta yang terangkai dalam jaringan)	a. Kerja sama dari masing masing <i>Stakeholder</i> b. Tujuan bersama
4	<i>Governance</i>	a. Aturan yang disepakati atau regulasi yang terkait.
5	<i>Acees to authority</i> (akses terhadap kekuasaan)	a. Prosedur atau aturan yang dapat diterima secara luas
6	<i>Distributive accountability / Responsibility</i> (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)	a. Pengambilan keputusan b. Pertanggung jawaban secara maksimal
7	<i>Information sharing</i> (berbagai informasi)	a. Perlindungan usaha b. Pelayanan akses yang mencapai semua sistem
8	<i>Acces to resoures</i> (akses terhadap sumberdaya)	a. Ketersediaan sumber keuangan b. Pemberdayaan

## B. Faktor Penghambat

No	Variabel	Indikator
1	Budaya	a. Tidak berani mengambil keputusan b. Tidak berani menanggung resiko
2	Institusi- institusi	a. Perbedaan relasi

3	Politik	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kurangnya inovasi pemimpin</li><li>b. Perubahan kesepakatan</li><li>c. Perbedaan kepentingan antar <i>Stakeholder</i></li></ul>



## **A. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014:13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif biasa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati dilapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena secara historik dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi ke dalam variable atau hipotesis, akantetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang kolaborasi antara pemerintah daerah yaitu dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian dengan pelaku UMKM dalam upaya pengembangan sector kerajinan yang ada di kecamatan Sanden.

## **1. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Menurut Rahmawati Dian E (2014:30) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari unit analisis data yang akan dijadikan objek penelitian. Data ini bisa dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan objek yang dibutuhkan menjadi narasumber sehingga dapat mendapatkan suatu informasi yang bisa menunjang atau bisa berhubungan dengan apa yang sedang diteliti. Data primer ini juga bisa berupa diperoleh dari narasumber yang akan di wawancarai baik secara individu ataupun kelompok. berdasarkan fakta dan data yang ada. Data primer diperoleh melalui:

### **a. Wawancara**

Pada penelitian ini yang akan dilakukan adalah mewawancarai atau percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2014:186). Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terawancara selanjutnya akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang dipertanyakan. dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian, UKM dan Koperasi selanjutnya adalah Pembimbing UMKM yang diutus dari Dinas yang ditempatkan Kecamatan Sanden, dan yang terakhir adalah pelaku UMKM atau pengrajin yang ada di dusun Jambu dan dusun Piring.

### **b. Data sekunder**

Menurut Rahmawati Dian E (2014:30) data sekunder adalah data yang bisa diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen resmi yang mencatat keadaan yang terjadidalam suatu objek penelitian. data sekunder juga

bisa berupa majalah, hasil-hasil studi, tesis, maupun hasil survey dari berbagai instansi pemerintahan maupun tidak. Peneliti menggunakan data sekunder karena untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan aparat Pemerintahan Desa maupun tokoh masyarakat.

#### **a. Dokumentasi**

Pengumpulan data Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mencatat dan mengambil dari sumber-sumber tertulis yang berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini (Lestari, 2014). Adapun data sekunder dalam penelitian ini nantinya akan diperoleh dari Dinas Perindustrian, UKM dan Koperasi Kabupaten Bantul, Kecamatan Sanden dan Pelaku UMKM yang ada di dusun Jambu dan dusun Piring.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November- Desember 2018. Dan lokasi penelitiannya akan dilaksanakan di :

1. Dinas Perindustrian,UKM dan Koperasi Kabupaten Bantul
2. Kantor Kecamatan Sanden
3. Kantor Desa Murtigading
4. Kantor Desa Gandingari
5. Dusun Piring
6. Dusun Jambu

### **3. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014:246-252) adapun model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir, dimana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila jawaban yang didapat dari narasumber kurang setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan suatu informasi yang dianggap kredibel. Dalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus sehingga bisa mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Aktifitas dalam analisis data yaitu:

#### **1. Pengumpulan Data**

Dari data yang diperoleh dilapangan nantinya akan di kumpulkan dan akan di olah secara objektif dan apa adanya sesuai dengan data yang dihasilkan dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

#### **2. Reduksi Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi dan memilih data yang dihasilkan dari Observasi, wawancara maupun dokumentasi yang telah dilaksanakan. selanjutnya akan dipilih dan peneliti akan memfokuskan sesuai dengan data data yang dibutuhkan.

#### **3. Penyajian data**

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data berupa dengan tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan nantinya akan disajikan guna mempermudah dalam memahami.

#### **4. Kesimpulan**

Sesuai dengan penelitian yang ada nantinya akan ditarik kesimpulan yang didasarkan dari data dan fakta yang ada dilapangan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini adalah untuk mengetahui dan menjawab dari permasalahan yang ada.

**Tabel 1.3. Teknik Pengumpulan Data**

No	Kebutuhan Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan
1.	Tipe <i>Networked Structure</i> (jenis struktur jaringan) a. Struktur jaringan b. Keterkaitan antar <i>Stakeholder</i>	Primer primer primer	Wawancara Wawancara	Dinas koperasi Dinas koperasi
2.	<i>Commitment to a common purpose</i> (komitmen terhadap tujuan) a. Alasan sebuah jaringan diadakan b. Komitmen dan perhatian	Primer primer	Wawancara Wawancara	Dinas koperasi Dinas koperasi
3.	<i>Trust among the participants</i> (adanya saling percaya diantara para pelaku / peserta yang terangkai dalam jaringan) a. Informasi informasi terpercaya b. Kerja sama antar <i>stakeholder</i> c. Tujuan bersama	Primer Primer primer	Wawancara Wawancara Wawancara	Dinas koperasi/ pendamping UKM
4.	<i>Governance</i> a. Saling percaya antar pelaku b. Siapa yang terlibat dan tidak boleh terlibat c. Aturan yang disepakati d. Kebebasan dalam menentukan kolaborasi yang akan dijalankan.	Primer Primer Primer Primer	Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara	Stakeholder Dinas Koperasi Dinas koperasi
5.	<i>Acees to authority</i> (akses terhadap	Primer &	Dokumentasi	

	kekuasaan)  a. Prosedur-prosedur yang dapat diterima secara luas b. Keputusan-keputusan dalam menjalankan pekerjaan	sekunder	Wawancara	Regulasi
6.	<i>Distributive accountability / Responsibility</i> (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)  a. Pengambilan keputusan b. Pertanggung jawaban secara maksimal	Primer & sekunder		Dinas Koperasi
7.	<i>Information sharing</i> (berbagai informasi)  a. Perlindungan usaha b. Pelayanan dan akses yang mencapai semua sistem	Primer Primer	Wawancara Wawancara	Dinas Koperasi
8.	<i>Acces to resoures</i> (akses terhadap sumberdaya)  a. Ketersediaan sumber keuangan b. Pemberdayaan	primer & sekunder	Wawancara Dokumentasi	Dinas koperasi Dinas koperasi
9.	Budaya  a. Bergantung pada prosedur b. Tidak berani mengambil keputusan c. Tidak berani menanggung resiko	Sekunder Primer Primer	Dokumentasi Wawancara Wawancara	Dinas koperasi Pelaku umkm Pelaku umkm
10	Institusi- Institusi  a. Perbedaan relasi b. Kebijakan	Primer Sekunder	Wawancara Dokumentasi	Dinas koperasi Dinas koperasi
11	Politik  a. Kurangnya inovasi pemimpin b. Perubahan kesepakatan c. Perbedaan kepentingan antar <i>Stakeholder</i>	Primer Primer	Wawancara Wawancara	Dinas koperasi Dinas koperasi

